

2025



RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Kabupaten Kutai kartanegara,

0811-541-5581

KATA PENGANTAR

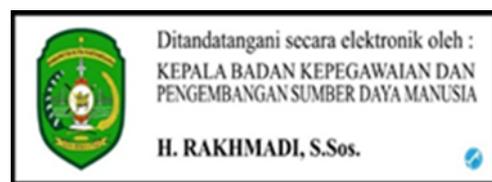
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang memuat Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka 1 tahun ke depan.

Rencana Kerja pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil, dengan memanfaatkan sebanyak banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif, dalam menyempurnakan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini.

Semoga Allah SWT meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan menyukseskan program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Program Dedikasi Kukar IDAMAN.

Tenggarong, Agustus 2024





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai III
Jln. Wolter Monginsidi Telp/Fax. (0541) 6666379 Kode Pos 75511

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN (PA)

NOMOR : B. 117/BKPSDM/SET.3/784/ 02 / 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA

PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P)
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memperlancar tugas perencanaan kegiatan dan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara di perlukan adanya tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Panitia Pelaksana Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja);
- Mengingat** :
1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 164);
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

- KEDUA : Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 pada diktum KESATU melaksanakan tugas Perencanaan Kegiatan BKPSDM tahun anggaran 2024
- KETIGA : Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku secara berkala melaporkan hasil pelaksanaannya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 20 Februari 2024

PENGGUNA ANGGARAN,

H. RAKHMADI, S.Sos

PEMBINA TK.I

NIP. 19660107 200012 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Peringgal

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-2
1.2	Landasan Hukum	I-2
1.3	Maksud dan Tujuan	I-4
1.4	Sistematika Penulisan	I-5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU	II-7
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM	II-7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	II-27
2.3	Isu -Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM	II-32
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra BKPSDM Tahun 2025	II-32
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-39
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM	III-40
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-40
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM	III-44
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM	IV-46
4.1	Program dan Kegiatan	IV-46
BAB V	PENUTUP	V-52

DAFTAR TABEL

Tabel TC-29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023 BKPSDM	II-15
Tabel II.2	Capaian IKU Tahun 2023	II-26
Tabel TC-30	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM	II-29
Tabel TC-31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 BKPSDM	II-34
Tabel TC-32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	II-39
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025	III-45
Tabel IV.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 BKPSDM	IV-48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dengan demikian daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2025 menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang

dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan sehingga tercapainya tujuan pelayanan publik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 sekaligus dalam upaya pencapaian target sasaran program yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2. TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. FUNGSI : a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	85	$IKM = \frac{\text{Total dr Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Hasil Survei	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tenggarong, Agustus 2024




 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
H. RAKHMADI, S.Sos.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2025, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1,8201);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. UU nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; dan
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Berdasarkan pertimbangan diatas, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen Rancangan Renja Tahun 2025 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menentukan prioritas program satu tahun dan digunakan sebagai pedoman dalam rencana kerja tahunan.
- b. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyamakan persepsi dan tercapainya komitmen bersama untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta memahami dan menilai arah kebijakan dan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terutama untuk mendukung terlaksananya percepatan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dengan Fokus Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu satu tahun (2025).

1.3.2 Tujuan :

- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kurun waktu 1 tahun sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kurun waktu satu tahun (2025) dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
- c. Terciptanya keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas melalui penyusunan rencana kegiatan tahunan.

- d. Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 5 (lima) Bab terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan gambaran umum tentang penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, fungsi Renja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

4.1 Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini memuat hal-hal yang dianggap penting serta rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan Renja BKPSDM.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara umum rata-rata capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 mencapai **97,07%** dengan predikat kinerja **“Sangat Tinggi”** dan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.296.810.806,00 dari pagu anggaran Rp. 40.497.194.742,00 (89,63%).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 3 (tiga) program. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Realisasi program tahun anggaran 2023 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

Indikator kinerja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu **“Nilai SAKIP Perangkat Daerah”** target kinerja 92,00 dengan realisasi 92,70 (100,76%).

Capaian kinerja di atas merupakan capaian kinerja tahun 2022 mengingat hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 belum dikeluarkan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain :

- a. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di lingkungan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara;

- b. Penerapan teknologi informasi pada beberapa program/kegiatan (aplikasi Simpeg Idaman, Sim Gaji, FMIS, SIPD, Simda BMD, e-Pantau dan Srikandi); dan
- c. Perubahan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.

Rata-rata capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah 100% dan 91,83% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target kinerja 20 dokumen, dengan realisasi 20 dokumen (100,00%)
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, target kinerja 2 dokumen, dengan realisasi 2 dokumen (100,00%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, target kinerja 15 dokumen, dengan realisasi 15 dokumen (100,00%)
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target kinerja 3 dokumen, dengan realisasi 3 dokumen (100,00%)
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target kinerja 15 Laporan, dengan realisasi 15 Laporan (100,00%)
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, target kinerja 1412 orang/bulan, dengan realisasi 1407 orang/bulan (99,65%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, target kinerja 1 laporan, dengan realisasi 1 laporan (100,00%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, target kinerja 12 laporan, dengan realisasi 12 laporan (100,00%)
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, target kinerja 2 dokumen, dengan realisasi 2 dokumen (100,00%);
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, target kinerja 2 laporan, dengan realisasi 2 laporan (100,00%)
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, target kinerja 1 Dokumen, dengan realisasi kinerja 1 Dokumen (100,00%);

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, target kinerja 3 paket, dengan realisasi kinerja 3 paket (100,00%); dan
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, target kinerja 50 orang, dengan realisasi 1 orang (2,00%)
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target kinerja 7 layanan, dengan realisasi 7 layanan (100,00%);
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target kinerja 1 paket, dengan realisasi 1 paket (100,00%);
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, target kinerja 3 paket, realisasi kinerja 3 paket (100,00%);
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, target kinerja 3 paket, dengan realisasi 3 paket (100,00%);
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu, target kinerja 1 laporan, realisasi 1 laporan (100,00%)
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target kinerja 2 laporan, realisasi kinerja 2 laporan (100,00%);
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, target kinerja 450 dokumen, realisasi 47 dokumen (10,44%).
-
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target kinerja 100,00%, dengan realisasi kinerja 100,00% (100,00%);
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, target kinerja 297 Unit, realisasi 297 Unit (100,00%);
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, target kinerja 142 Unit, realisasi 142 Unit (100,00%).
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 12 bulan, dengan realisasi kinerja 12 bulan (100,00%);
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, target kinerja 1 Laporan, dengan realisasi 1 Laporan (100,00%);
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, target kinerja 12 Laporan, dengan realisasi 12 Laporan (100,00%);

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target kinerja 1 Laporan, dengan realisasi 1 Laporan (100,00%); dan
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, target kinerja 12 Laporan, dengan realisasi 12 Laporan (100,00%).
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 12 unit, dengan realisasi 12 unit (100,00%).
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, target kinerja 12 unit, dengan realisasi 12 unit (100,00%).
2. Program Kepegawaian Daerah :

Indikator kinerja untuk Program Kepegawaian Daerah yaitu **“Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara”** target kinerja 93,00% dengan realisasi 99,97% (96,88%). Capaian kinerja untuk Program Kepegawaian Daerah tahun 2023 melebihi target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung pencapaian target kinerja ini yaitu :

- a. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terbaru yang disesuaikan dengan SOTK Perangkat Daerah yang menjadi dasar penyusunan Bezetting dan Existing pegawai sebagai dasar untuk menyusun kebutuhan jabatan baik jabatan administrasi maupun jabatan fungsional.
- b. Persetujuan Kemenpan RB terhadap usulan formasi penerimaan PPPK tahun 2023 sebesar 3.000 formasi.
- c. Tersedianya anggaran dan fasilitas lainnya untuk melaksanakan rekrutmen PPPK tahun 2023.

Capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Kepegawaian Daerah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN, target kinerja 1147 ASN, dengan realisasi 3183 ASN (277,51%).

Capaian kinerja untuk Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN melebihi target yang ditetapkan. Secara umum capaian kinerja sub kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Pengadaan,

Pemberhentian dan Informasi ASN adalah 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%);
- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, target kinerja 2 Dokumen, dengan realisasi 2 Dokumen (100,00%);
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN, target kinerja 1 Dokumen, dengan realisasi 1 Dokumen (100,00%);
- Fasilitasi lembaga profesi ASN, target kinerja 1 Lembaga, dengan realisasi 1 Lembaga (100,00%);
- Pengelolaan data Kepegawaian, target kinerja 2 Dokumen, dengan realisasi 2 Dokumen (100,00%); dan
- Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, target kinerja 1 Laporan, dengan realisasi 1 Laporan (100,00%).

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, target kinerja 2928 ASN, dengan realisasi 2568 ASN (87,70%);

Target kinerja untuk Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN tidak tercapai, antara lain disebabkan :

- ❖ Dokumen Standar Kompetensi Jabatan belum selesai disusun; dan
- ❖ Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sesuai SOTK terbaru belum selesai disusun.

Secara umum capaian kinerja sub kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN sesuai target kinerja yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

- Pengelolaan Mutasi ASN, target kinerja 1 Dokumen, realisasi 1 Dokumen (100,00%);
- Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN, target kinerja 1 Dokumen, dengan realisasi 1 Dokumen (100,00%); dan
- Pengelolaan promosi ASN, target kinerja 1 Dokumen, dengan realisasi kinerja 1 Dokumen (100,00%).

c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, target kinerja 751 ASN, dengan realisasi 749 ASN (99,73%);

Capaian kinerja untuk Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN kurang dari target kinerja, antara lain disebabkan :

- ❖ Rendahnya minat ASN Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan kapasitas kinerjanya;
- ❖ Data PNS yang sudah memiliki pendidikan lebih tinggi tidak terdata pada aplikasi Simpeg maupun SIASN.

Adapun rincian capaian kinerja untuk sub kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas kinerja ASN, target kinerja 544 Orang, dengan realisasi 566 Orang (104,04%);
- Pengelolaan Assesment Center, target kinerja 2 Dokumen, dengan realisasi 2 Dokumen (100,00%);
- Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN, target kinerja 127 Orang, dengan realisasi 127 Orang (100,00%);

d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 12607 ASN, dengan realisasi 8540 ASN (67,74%)

Target kinerja untuk Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur tidak tercapai, dengan kendala antara lain :

- ❖ Kesadaran PNS untuk membuat Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPK PNS) masih rendah;
- ❖ PNS belum memahami penyusunan SKP sesuai Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022; dan
- ❖ Pengetahuan terkait dengan penyusunan SKP masih rendah.

Solusi/rekomendasi yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi kendala di atas antara lain :

- ❖ Perlunya Ketegasan dari Pemerintah Daerah untuk menerapkan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai yang tidak menyampaikan SKP PNS pada BKPSDM.
- ❖ Perlu diadakan bimbingan secara berkelanjutan pada manajemen kinerja khususnya terhadap penyusunan SKP.

Capaian kinerja sub kegiatan yang termasuk dalam Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dapat digambarkan sebagai berikut :

- Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%);
- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 1 Dokumen, dengan realisasi 1 Dokumen (100,00%);
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%);
- Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai, target kinerja 176 Orang, dengan realisasi kinerja 176 Orang (100,00%);
- Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, target kinerja 2 Laporan, dengan realisasi kinerja 2 Laporan (100,00%).
- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, target kinerja 2 Dokumen, dengan realisasi kinerja 2 Dokumen (100,00%)

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Indikator kinerja untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu **“Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional”** target kinerja 28,00% dengan realisasi 29,64% (105,86%).

Capaian kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melebihi target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung pencapaian target kinerja program ini antara lain :

- a. Kerjasama yang dilakukan daerah dengan kementerian/Lembaga/ Penyelenggara Pelatihan;
- b. Regulasi yang mewajibkan PNS harus melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 JP pertahun
- c. Tersedianya Human Capital Development Plan, meskipun belum mengakomodasi kebutuhan seluruh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Anggaran pengembangan kompetensi yang semakin meningkat; dan
- e. Tersedianya ruang belajar di beberapa Perangkat Daerah sebagai tempat pengembangan kompetensi.

Capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, target kinerja 565 ASN, dengan realisasi 610 ASN (107,96%)
- Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%)
 - Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum, target kinerja 565 Orang, dengan realisasi 610 Orang (107,96%).
- b. Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional, target kinerja 413 ASN, dengan realisasi 502 ASN (121,55%)
- Capaian kinerja kegiatan ini melebihi target kinerja karena adanya kesalahan penetapan kinerja pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 dimana adanya pergeseran biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator menjadi Pelatihan Fungsional tidak diikuti perubahan target kinerja.
- Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, target kinerja 13 orang, dengan realisasi 13 orang (100,00%); dan
 - Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan, target kinerja 5 Laporan, dengan realisasi 5 Laporan (100,00%)

Untuk lebih jelasnya disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 pada tabel II.1 (T-C.29) sebagai berikut:

Tabel T-C.29																	
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN																	
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN (2024)																	
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA																	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																	
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
				2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (11 + 12 + 14)/10
5	UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN																
5.03	KEPEGAWAIAN																
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai 80	61	65	70	75	80	80	42,45	54,94	70	74,46	106,37%		57,28	71,60%
		Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	Nilai 90	80	82	85	87	90	90	76,33	84,54	85	88,25	103,82%		83,04	92,27%
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai 75,89	85	86	87	88	89	89	84,94	92,7	87	75	85,77%		84,09	94,48%
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen 110	24	23	24	23	23	227	153	20	10	6	60,00%		179	78,85%
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen 32	7	6	7	6	6	64	42	2	3	2	66,67%		46	71,88%

5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	75	15	15	15	15	15	150	106	15	5	3	60,00%		124	82,67%
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	2	2	2	2	2	13	5	3	2	1	50,00%		9	69,23%
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	89	15	15	15	15	15	164	116	15	3	0	0,00%		131	79,88%
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	6480	1080	1080	1080	1080	1080	11880	9679	1407	1190	554	46,55%		11.640	97,98%
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	1	1	1	1	10	7	1	1	1	100,00%		9	90,00%
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	60	12	12	12	12	12	120	84	12	12	7	58,33%		103	85,83%
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	10	2	2	2	2	2	20	13	2	2	1	50,00%		16	80,00%
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	2	2	2	2	2	20	13	2	2	1	50,00%		16	80,00%
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	1	2	2	3	2	13	6	1	2	0	0,00%		7	53,85%
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Orang	111	0	0	30	30	30	201	0	0	30	0	0,00%		-	0,00%

5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	50	50	50	50	50	280	120	1	50	0	0,00%		121	43,21%
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	7	7	8	8	8	46	21	7	8	0	0,00%		28	60,87%
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	1	1	1	1	5	2	1	1	1	100,00%		4	80,00%
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	3	3	3	3	18	9	3	3	1	33,33%		13	72,22%
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	3	3	3	3	3	3	18	9	3	3	1	33,33%		13	72,22%
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	0	0	2	2	2	9	0	0	2	1	50,00%		1	11,11%
5.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Paket	1	1	1	1	1	1	6	2	1	1	0	0,00%		3	50,00%
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	2	2	1	0	0,00%		4	80,00%
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1000	450	450	450	450	450	3250	1900	47	450	72	16,00%		2.019	62,12%
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	-	1	2	3			6	0	3	3	1	33,33%		4	66,67%
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	0,00%		67	66,67%
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1	1	1	1	1	9	7	142	6	0	0,00%		149	1655,56%
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	7	58,33%		10	86,11%

5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	2	1	1	0	0,00%		3	60,00%
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	7	58,33%		31	51,67%
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	2	1	1	0	0,00%		3	60,00%
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	12	12	60	12	12	12	7	58,33%		31	51,67%
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	41	12	12	12	12	12	101	69	12	14	4	28,57%		85	84,16%
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	41	12	12	12	12	12	101	69	12	15	4	26,67%		85	84,16%
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	91,5	92	93	94	95	96	96	89,13	99,97	94	0	0,00%		63	65,66%
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	ASN	1407	1058	1147	1262	1365	1306	7545	3463	3183	1262	0	0,00%		6.646	88,08%
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	5	1	1	1	1	1	10	7	1	1	1	100,00%		9	90,00%
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	1	1	2	1	1	7	3	2	1	0	0,00%		5	71,43%
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	6	1	1	0	1	10	6	1	1	0	0,00%		7	70,00%

5.03.02.2.01.08	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	1	2	1	1	1	7	3	1	1	0	0,00%		4	57,14%
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	1	2	0	0	0	5	4	0	3	0	0,00%		4	80,00%
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	2	1	1	1	1	1	7	3	2	1	0	0,00%		5	71,43%
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1	2	1	1	1	1	7	3	2	1	0	0,00%		5	71,43%
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	ASN	2510	2790	2928	2583	2495	2473	15779	13939	2568	2583	0	0,00%		16.507	104,61%
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	1	2	2	2	2	1	10	6	1	1	0	0,00%		7	70,00%
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	2	2	2	1	2	1	10	6	1	1	0	0,00%		7	70,00%
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	2	2	2	1	2	10	6	1	1	0	0,00%		7	70,00%
5.03.02.2.03	Pengembangan kompetensi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	ASN	680	560	560	560	360	360	3080	1737	749	1190	0	0,00%		2.486	80,71%
5.03.02.2.03.01	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	285	380	380	380	180	180	1785	1023	566	590	1.824	309,15%		3.413	191,20%
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	Dokumen	4	1	1	1	1	1	9	5	2	3	1	33,33%		8	88,89%
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	63	100	100	100	100	100	563	186	127	121	5	4,13%		318	56,48%
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	ASN	13514	13084	12607	12093	11491	10854	73643	36395	8540	12093	0	0,00%		44.935	61,02%
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	n/a	1	1	1	1	1	5	2	1	1	1	100,00%		4	80,00%

5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	2	2	2	2	1	1	10	6	1	1	0	0,00%		7	70,00%
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	1	1	1	1	1	5	10	6	1	1	0	0,00%		7	70,00%
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	n/a	348	348	348	348	348	1740	365	176	348	304	87,36%		845	48,56%
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	60	15	15	17	20	20	147	77	2	1	1	100,00%		80	54,42%
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	15	35	35	30	30	30	175	43	2	35	11	31,43%		56	32,00%
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persen	15,94	18,38	20,65	22,64	24,64	26,64	26,64	39,98	29,64	26,76	5	17,55%		74	278,97%
5.04.02.2.01	Pengembangan kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	ASN	1486	210	200	200	200	200	2496	1978	610	784	3.683	469,77%		6.271	251,24%
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	1486	210	200	200	200	200	2496	1978	610	784	3.683	469,77%		6.271	251,24%
5.04.02.2.02	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	ASN	673	120	122	112	106	112	1245	1023	502	685	0	0,00%		1.525	122,49%
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	orang	5	0	12	12	6	12	47	16	13	12	0	0,00%		29	61,70%

5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	5	1	1	1	1	1	10	6	5	5	1	20,00%		12	120,00%

2.1.1 Program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2023, tidak ada program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

- a. Mutasi dan Promosi ASN (87,70%)
- b. Pengembangan Kompetensi ASN (99,73%)
- c. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (67,74%)

Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (99,65%)
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (2,00%)
- c. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (10,44%)

2.1.2 Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- f. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- g. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- k. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- m. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- n. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- o. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- p. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- q. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- r. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- s. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- t. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- u. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- v. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- w. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- x. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN
- y. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- z. Pengelolaan Data Kepegawaian
- aa. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
- bb. Pengelolaan Mutasi ASN
- cc. Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN
- dd. Pengelolaan Promosi ASN

- ee. Pengelolaan Assesment Center
- ff. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- gg. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- hh. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- ii. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- jj. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
- kk. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
- ll. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
- mm. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- nn. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- oo. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan

2.1.3 Program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (100,76%);
- b. Program Kepegawaian Daerah (107,49%)
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (105,86%)

Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (277,51%);
- b. Pengembangan kompetensi Teknis (107,96)
- c. Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (121,55%)

Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- a. Peningkatan kapasitas kinerja ASN (104,04%)
- b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum (107,96%)

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

- a. Lemahnya pemahaman terhadap sistem perencanaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Lemahnya koordinasi antar bidang;
- c. Sistem tata kelola pemerintahan masih banyak yang bersifat manual;
- d. Aplikasi pemberhentian belum tersedia secara online
- e. Kasus-kasus terhambat oleh berkas yang kurang lengkap
- f. SDM pengelola kasus kurang memahami proses pemberian hukuman disiplin
- g. Kesadaran PNS untuk membuat Penilaian Prestasi Kerja PNS masih rendah
- h. Format Laporan PPK PNS 2021 sesuai dengan Permenpan 8 sementara PPK PNS 2022 harus mengacu pada Permenpan 6 sehingga banyak PNS yang belum memahami penyusunan SKP sesuai Permenpan.
- i. Pengetahuan terkait dengan penyusunan SKP masih rendah
- j. Seleksi Penerimaan ASN berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh BKN Pusat
- k. Proses penerimaan ASN tahun 2021 yang belum selesai dan menunggu pengumuman kelulusan PPPK Guru Tahap III dari Kemendikbud RI
- l. SOP belum sesuai dengan aplikasi
- m. SDM Pengelola layanan kurang memahami prosedur layanan
- n. Perangkat teknologi informasi belum sesuai standar
- o. Penyusunan Data awal Calon Penerima Beasiswa tidak berbasis data riil sehingga tidak sesuai dengan jumlah pendaftar/penerima Beasiswa

- p. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Beasiswa Kukar Idaman tidak memuat tentang PNS penerima Beasiswa Tematik
- q. Belum adanya Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar/Izin Belajar yang disusun dalam rangka pemenuhan dan kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan ASN
- r. Aplikasi yang tersedia belum mengakomodir indikator kedisiplinan kepegawaian secara keseluruhan tetapi hanya terkait absensi /rekaman kehadiran pegawai namun untuk daerah terpencil aplikasi tidak dapat diakses karena tidak tersedianya jaringan internet
- s. Ketegasan pemerintah daerah untuk melaksanakan ketentuan/peraturan penegakan atas pelanggaran disiplin kepegawaian masih belum maksimal.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

- a. Penerapan teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja (e-RPJMD, SIPD, SIMDA Keuangan, e-Pantau);
- b. Tersedianya aplikasi penatausahaan keuangan yang memudahkan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- c. Penggunaan aplikasi Simda BMD dalam penatausahaan Barang Milik Daerah;
- d. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI

Faktor-faktor penyebab melebihinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

- a. Kerjasama yang dilakukan daerah dengan kementerian/Lembaga/ Penyelenggara Pelatihan;
- b. Regulasi yang mewajibkan PNS harus melaksanakan pengembangan kompetensi minimal 20 JP pertahun;

- c. Pengembangan Kompetensi ASN yang dilaksanakan Secara Online Kolaborasi lintas K/L dalam pelaksanaan Literasi Digital Sektor Pemerintahan;
- d. Penerapan SIASN secara tepat guna dan tepat waktu;
- e. Proses layanan berbasis online dan papperless;
- f. Penggunaan aplikasi layanan kepegawaian yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Aplikasi SIASN, yang berimplikasi pada beberapa layanan seperti kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
- g. Pengembangan Kompetensi ASN yang dilaksanakan Secara Online Kolaborasi lintas K/L dalam pelaksanaan Literasi Digital Sektor Pemerintahan;
- h. Tersedianya aplikasi pelayanan proses ijin perceraian yang terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian; dan
- i. Kekeliruan penetapan target kinerja dalam penyusunan rencana kerja tahun 2023 dan rencana kerja perubahan tahun 2023.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Dengan adanya capaian kinerja yang tidak memenuhi target kinerja khususnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Kepegawaian Daerah maka seluruh bidang di lingkungan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara harus bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja program yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dengan cara melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, melakukan evaluasi secara rutin dan berkala serta melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi yang disepakati.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perlu dilakukan perencanaan secara sistematis dalam penyusunan rencana kerja, rencana kerja perubahan, penganggaran, dan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta melakukan evaluasi secara rutin dan berkala sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil maksimal.

Untuk capaian sasaran strategis tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.2 Capaian IKU Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%Realisasi Kinerja	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM	Indeks	80	76,33	95,41	82	84,54	103,10	Meningkat
Rata-rata Capaian Kinerja						82	84,54	103,10	

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 antara lain :

1. Tersedianya aplikasi layanan kepegawaian yang memudahkan pemberian layanan kepada seluruh ASN
2. Tersedianya aplikasi survei Kukar yang memudahkan pelaksanaan survei
3. Pengembangan kompetensi ASN BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara
4. Komitmen seluruh ASN BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh ASN.

Meskipun target kinerja Indikator Kinerja Utama sudah tercapai, tetapi masih terdapat permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan sebagai berikut :

1. Waktu Penyelesaian Layanan masih dirasakan lambat oleh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :
 - a. Belum ada Standar Pelayanan untuk masing-masing jenis layanan yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. Belum melakukan evaluasi dan revisi terhadap SOP, karena terdapat perubahan aturan terkait administrasi kepegawaian.
 - c. Petugas layanan belum memiliki keterampilan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

2. Kesesuaian Produk Layanan masih dirasakan rendah oleh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini disebabkan oleh :
 - a. Database ASN belum terintegrasi dengan sistem pelayanan.
 - b. Ketelitian dalam melakukan verifikasi dokumen layanan kepegawaian masih lemah.
3. Kualitas Sarana dan Prasarana yang dianggap kurang memadai oleh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain disebabkan :
 - a. Posisi layanan berada di lantai 3, dan fasilitas *lift* kurang maksimal (sering mengalami kendala teknis) sehingga mengurangi tingkat kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian.
 - b. Belum adanya ruang tunggu yang representati bagi ASN.

Berdasarkan kendala tersebut di atas maka rekomendasi pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Membuat Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan kepegawaian yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Melakukan evaluasi dan revisi SOP layanan kepegawaian;
3. Memberikan kesempatan dalam peningkatan kompetensi terkait *Service Excellent*;
4. Mengoptimalkan fungsi website BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Peremajaan data ASN secara berkala (setiap ada perubahan data ASN);
6. Meningkatkan peran atasan langsung dalam memverifikasi dokumen layanan kepegawaian;
7. Meningkatkan kompetensi teknis bagi pejabat pelaksana; dan
8. Mengusulkan anggaran untuk membangun ruang tunggu yang representatif bagi ASN.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Terbentuknya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dikarenakan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut BKPSDM), Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 atas Perubahan Pertama

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lebih lanjut penjelasan mengenai tugas dan fungsi BKPSDM diuraikan bahwa BKPSDM melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah.

Target sasaran pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel II.3 (T-C.30) berikut:

Tabel II.3 (T-C.30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKPSDM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Indikator*)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Indikator Tujuan BKPSDM													
1.	Indeks Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara			61	65	70	75	80	42,45	54,94	70	75	Target kinerja tidak tercapai
Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM setingkat Impact													
1.	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM			80	82	85	87	89	76,33	84,54	85	87	
Indikator Kinerja Kunci													
1			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	82	84	86	88	90	46,68	58,14	58,25	59,00	Target kinerja tidak tercapai
2			Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16	18	20	55	24	10,51	10,11	10,11	11	Target kinerja tidak tercapai
3			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	5	7	9	11	13	38,11	33,11	40	45	
Indikator Kinerja Program setingkat Outcome													
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			85	86	87	88	89	84,94	92,70	87	88	
2	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara			92	93	94	95	96	89,13	99,97	94	95	
3	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional			18,38	20,65	22,64	24,64	26,64	22,76	29,64	22,64	24,64	
Indikator Kinerja Kegiatan													

1	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24	23	24	23	23	19	20	24	23	
2	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			15	15	15	15	15	12	15	15	15	
3	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			2	2	2	2	2	1	2	2	2	
4	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			1	2	2	3	2	1	1	2	3	
5	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			7	7	8	8	8	7	7	8	8	
6	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
8	Jumlah Barang Milik Daerah			12	12	12	12	12	16	12	12	12	
9	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan			1058	1147	1262	1365	1306	645	3183	1262	1365	
10	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan			2790	2928	2583	2495	2473	8143	2568	2583	2495	Target kinerja tidak tercapai
11	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi			560	560	560	360	360	322	749	560	360	
12	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya			13084	12607	12093	11491	10854	11438	8540	12093	11491	Target kinerja tidak tercapai
13	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis			210	200	200	200	200	280	610	200	200	
14	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional			120	122	112	106	112	116	502	112	106	

2.3 Isu -Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis bidang kepegawaian yaitu:

- a. Optimalisasi pengelolaan informasi kepegawaian;
- b. Penataan ASN sesuai dengan formasi;
- c. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan standar pelayanan;
- d. Pelaksanaan mutasi, promosi dan pengembangan karier sesuai dengan pola karier dan formasi PNS;
- e. Optimalisasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi aparatur;
- f. Teridentifikasinya kesenjangan kompetensi aparatur;
- g. Optimalisasi penegakan disiplin, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; dan
- h. Peningkatan tata kelola dan kinerja BKPSDM.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra BKPSDM Tahun 2025

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BKPSDM dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BKPSDM dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan setiap perangkat daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Pada awal tahun 2025, BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara menerima 2 (dua) buah gedung yang berlokasi di Kecamatan Tenggarong Seberang yang akan difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan. Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana gedung-gedung tersebut, BKPSDM Kabupaten

Kutai Kartanegara memerlukan anggaran yang cukup besar. Beberapa komponen sarana dan prasarana yang perlu dipertimbangkan untuk dialokasikan anggarannya antara lain pemeliharaan/perawatan gedung, pengadaan peralatan dan perlengkapan pembelajaran, fasilitas teknologi informasi, fasilitas pelatihan khusus, pengadaan bahan dan alat pembelajaran serta pengelolaan dan pemeliharaan rutin.

Pada tahun 2025 BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara juga akan mengembangkan layanan berbasis digital yang terintegrasi dengan Simpeg Idaman yang diharapkan akan memberikan banyak manfaat bagi efisiensi dan kualitas layanan kepegawaian. Integrasi dengan Simpeg Idaman dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen data pegawai hingga administrasi kepegawaian.

Untuk penguatan manajemen kinerja berbasis sistem merit, BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara akan mengoptimalkan pengembangan kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan perangkat daerah, melaksanakan penilaian kompetensi bagi pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional serta mengoptimalkan manajemen talenta.

Rincian kebutuhan anggaran pada tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana Tabel TC.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah ini :

Tabel TC-31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD/Renstra PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN						UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Sakip	87 Nilai	52.799.638.514,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Sakip	88 Nilai	15.633.331.188,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	185.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	1.000.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	65.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450.000.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	55.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.000.000,00	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	65.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150.000.000,00	
4						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	
5						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000,00	
6						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	14.098.766.102,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	11.242.915.948,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1190 Orang/bulan	13.928.766.102,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/bulan	11.092.915.948,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	120.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	100.000.000,00	Penyesuaian besaran honorarium pengelola keuangan terhadap pagu anggaran yang dikelola Perangkat Daerah
4						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kukar	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	25.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	44.840.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	105.000.000,00	
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	44.840.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	30.000.000,00	Penyesuaian kebutuhan riil
2						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	25.000.000,00	
3						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	415.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	240.000.000,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	240.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	140.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan

2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	75.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	50.000.000,00	Penyesuaian terhadap Standar Biaya Umum yang berlaku
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	100.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50.000.000,00	Penyesuaian terhadap Standar Biaya Umum yang berlaku
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan	1.575.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan	1.436.000.000,00	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	Pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan Gedung DIKLAT BKPSDM
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	150.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	150.000.000,00	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	250.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	200.000.000,00	kebutuhan operasional kantor dan Gedung DIKLAT BKPSDM
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	127 Dokumen	21.000.000,00	Sub kegiatan tidak dibutuhkan
5	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	150.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	75.000.000,00	Penyesuaian kebutuhan riil
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	125.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	125.000.000,00	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	400.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	315.000.000,00	Pemenuhan kebutuhan terkait peningkatan frekuensi rapat koordinasi dengan instansi pusat/kementerian
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450 Dokumen	100.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450 Dokumen	100.000.000,00	
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	150.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	300.000.000,00	Pengelolaan website BKPSDM dan pelaksanaan fungsi PPID Pembantu

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	30.990.519.600,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Persen	100.000.000,00	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	196 Unit	28.689.711.600,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana belajar untuk gedung diklat BKPSDM
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	264 Unit	2.300.808.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 nit	100.000.000,00	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung untuk gedung diklat BKPSDM
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.153.142.812,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.119.415.240,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	22.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	22.000.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.119.330.560,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	170.000.000,00	Pemenuhan kebutuhan pembayaran rekening listrik, air dan speedy (indihome) untuk gedung diklat BKPSDM
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	167.290.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	100.000.000,00	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor diklat BKPSDM
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	844.522.252,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	827.415.240,00	Pemenuhan kebutuhan Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan Gedung Diklat BKPSDM
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	12 Unit	1.337.370.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	12 Unit	390.000.000,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	325.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	325.000.000,00	

2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	1.012.370.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket		Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Gedung DIKLAT BKPSDM di Tenggara Seberang
3						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	65.000.000,00	
	Program Kepegawaian Daerah		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	94 Persen	10.690.000.000,00	Program Kepegawaian Daerah		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	95 Persen	8.290.000.000,00	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	1365 ASN	2.050.000.000,00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	1365 ASN	2.050.000.000,00	
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Kebutuhan ASN untuk 59 Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	450.000.000,00	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	450.000.000,00	
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	100.000.000,00	
4	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	500.000.000,00	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	500.000.000,00	
5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	650.000.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	650.000.000,00	Digitalisasi seluruh layanan kepegawaian BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara
6	Pengelolaan data Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000,00	Pengelolaan data Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000,00	
7	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	150.000.000,00	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	150.000.000,00	Pelaksanaan evaluasi data 59 Perangkat Daerah
	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	2495 ASN	625.000.000,00	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	2495 ASN	625.000.000,00	

1	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	225.000.000,00	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	225.000.000,00	Menindaklanjuti perubahan nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai Permenpan RB No.45 Tahun 2022
2	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Kab. Kukar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	200.000.000,00	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Kab. Kukar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	200.000.000,00	
3	Pengelolaan promosi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	200.000.000,00	Pengelolaan promosi ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	200.000.000,00	
	Pengembangan kompetensi ASN		Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	ASN	6.650.000.000,00	Pengembangan kompetensi ASN		Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	360 PNS	4.250.000.000,00	
1	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	600 Orang	2.200.000.000,00	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	600 Orang	1.250.000.000,00	Mandatory spending pengembangan kompetensi SDM aparatur
2	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	3 Dokumen	2.950.000.000,00	Pengelolaan Assesment Center	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	3 Dokumen	1.500.000.000,00	Seleksi JPTP, Assesment Pejabat Ess III, IV dan Pejabat Fungsional serta optimalisasi Manajemen Talenta
3	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 Orang	1.500.000.000,00	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang	1.500.000.000,00	Beasiswa PNS Tugas Belajar, Beasiswa Kukar Idaman, Beasiswa Tematik ASN Memenuhi Kebutuhan Kesenjangan kualifikasi Pendidikan dan Jabatan ASN Berdasarkan Analisa Jabatan dan Beban Kerja

	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	11491 ASN	1.365.000.000,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	11491 ASN	1.365.000.000,00	
1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	100.000.000,00	
2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	850.000.000,00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	850.000.000,00	Sosialisasi Manajemen ASN
3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	75.000.000,00	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	75.000.000,00	
4	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	348 Orang	90.000.000,00	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	348 Orang	90.000.000,00	
5	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	200.000.000,00	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	200.000.000,00	Sosialisasi peraturan penegakan disiplin ASN
6	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	35 Dokumen	50.000.000,00	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	30 Dokumen	50.000.000,00	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	24,64 Persen	11.170.000.000,00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	24,64 Persen	8.820.000.000,00	
	Pengembangan kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	800 ASN	5.350.000.000,00	Pengembangan kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	200 ASN	3.000.000.000,00	
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	800 Orang	5.350.000.000,00	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	550 Orang	3.000.000.000,00	Mandatory spending pengembangan SDM berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah

Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	635 ASN	5.820.000.000,00	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	106 ASN	5.820.000.000,00		
2	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	90 orang	1.000.000.000,00	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	90 Orang	1.000.000.000,00	1. Mandatory spending pengembangan kompetensi SDM aparatur
2	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	4.820.000.000,00	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	4.820.000.000,00	Mandatory spending pengembangan SDM berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah
JUMLAH					74.659.638.514,00	JUMLAH				32.743.331.188,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga tidak mengakomodir usulan program dan kegiatan masyarakat. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, termasuk Perangkat Daerah yang tidak mengambil peran dalam pembahasan Musyawarah Pembangunan (MUSRENBANG) dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Tabel T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2025**

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Tidak ada

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Secara spesifik program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis merupakan upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinkronisasi antara program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2021-2026, dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan dari norma, peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, secara nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Rencana Strategis kementerian/kelembagaan.

Telaahan strategis berdasarkan Rencana Strategis terhadap 4 (empat) kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut:

A. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina Aparatur Sipil Negara Kementerian PAN-RB memiliki visi **“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong” dan misi “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”**. Hal ini dicapai dengan tujuan strategis, yaitu:

- a. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik - *digital bureaucracy*;
- b. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global;
- c. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel;
- d. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas;
- e. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani;
- f. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN;
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis;
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja; dan
- d. Transformasi pelayanan publik.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kukar, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara.

B. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

Badan Kepegawaian Negara (BKN), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkan oleh BKN adalah **“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”** untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, netral dan sejahtera. Visi tersebut dicapai melalui 5 (lima) misi, yaitu:

- a. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
- b. Penyelenggaraan manajemen ASN;
- c. Penyimpanan informasi pegawai ASN;
- d. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN; dan
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021-2026 dalam hal kebijakan pembangunan di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui peningkatan profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur;
- b. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur.

Gambaran diatas memberikan arah dalam dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis, merupakan penjabaran dan tindaklanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan

administrasi Aparatur Sipil Negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.

C. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;

Lembaga Administrasi Negara (LAN), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil. Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah **“Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class Government Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

- a. Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional;
- b. Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis evidence dan penyediaan analisis kebijakan yang kompeten;
- c. Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi;
- d. Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik.

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan peningkatan program pendidikan kedinasan Aparatur Sipil Negara dan program pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kukar, mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

D. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang merupakan salah satu unit organisasi dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki visi “**Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang Kompeten dan Profesional**” yang dicapai melalui 3 (tiga) misi yaitu:

- a. Meningkatkan Standar Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. Menyelenggarakan Sertifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri;
- c. Mengembangkan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.

Berdasarkan telaahan lingkungan strategis dari 4 (empat) Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga sebagaimana dipaparkan diatas, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kepegawaian, serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di bidang aparatur maka isu-isu strategis ditingkat Pemerintah Pusat atau nasional yang terkait dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- a. Optimalisasi pengelolaan informasi kepegawaian;
- b. Penataan ASN sesuai dengan formasi;
- c. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan standar pelayanan;
- d. Pelaksanaan mutasi, promosi dan pengembangan karier sesuai dengan pola karier dan formasi PNS;
- e. Optimalisasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi aparatur;
- f. Teridentifikasinya kesenjangan kompetensi aparatur;
- g. Optimalisasi penegakan disiplin, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; dan
- h. Peningkatan tata kelola dan kinerja BKPSDM.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 1(satu)

tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh BKPSDM untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2026.

Sementara itu, sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara.

Sasaran dari tujuan tersebut yaitu : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah.

Tujuan dan sasaran renja BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III-1

**Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025**

TUJUAN	SASARAN		TARGET RENJA TAHUN 2025
	URAIAN	INDIKATOR	
Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara			75
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	87

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
2. Pencapaian tujuan BKPSDM untuk meningkatkan profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah;
4. Penguatan manajemen kinerja BKPSDM berbasis sistem merit; dan
5. Penyelenggaraan pengembangan PNS berdasarkan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp. 32.228.331.188,00.

Kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 sebagian besar dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Tenggarong, kecuali untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum dan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan yang dilaksanakan di luar Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain di Samarinda bekerja sama dengan LAN Samarinda dan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Jakarta.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 difokuskan untuk mendukung program kerja Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam program dedikasi KUKAR IDAMAN. Dalam upaya mendukung program dedikasi tersebut, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat amanat untuk melaksanakan Program Aparatur Negara Bahagia dan Program Digitalisasi Pelayanan Publik.

BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara diberi amanat sebagai salah satu perangkat daerah yang mengampu Program Digitalisasi Pelayanan Publik yang ditujukan untuk membangun mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Dalam program ini peranan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menempatkan aparatur sesuai kebutuhan perangkat daerah sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program dan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 disusun secara sistematis untuk menjawab isu-isu strategis dengan skala prioritas agar tujuan dan sasaran strategis dapat diwujudkan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan profesionalitas ASN di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan upaya, kerja keras dan sinergitas dari seluruh perangkat daerah, mengingat saat ini nilai indeks profesionalitas ASN masih sangat rendah. Upaya pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM telah tercermin dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Tabel IV-1

Tabel T-C.33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. KUTAI KARTANEGARA**

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.03	KEPEGAWAIAN								
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip		88 Nilai	15.633.331.188,00			89 Nilai	13.792.806.535,0
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		23 Dokumen	1.000.000.000,00			23 Dokumen	185.000.000,0
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	3 Dokumen	450.000.000,00	APBD		6 Dokumen	65.000.000,0
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	5 Laporan	50.000.000,00	APBD		15 Dokumen	55.000.000,0
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	1 Laporan	150.000.000,00	APBD		2 Dokumen	65.000.000,0
5.03.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kukar	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD			
5.03.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kukar	1 Data	250.000.000,00	APBD			
5.03.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	1 Berita Acara	50.000.000,00	APBD			

5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		15 Laporan	11.242.915.948,00			15 Laporan	10.494.641.295,0
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1260 Orang/bulan	11.092.915.948,00	APBD		1080 Orang	10.344.641.295,0
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	1 Laporan	25.000.000,00	APBD		1 Laporan	50.000.000,0
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kukar	12 Laporan	100.000.000,00	APBD	Penyesuaian besaran honorarium pengelola keuangan terhadap pagu anggaran yang dikelola Perangkat Daerah	12 Laporan	100.000.000,0
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kukar	1 Laporan	25.000.000,00	APBD			
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		2 Dokumen	105.000.000,00			2 Dokumen	45.000.000,0
5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	2 Laporan	25.000.000,00	APBD	Penyesuaian kebutuhan riil	2 Laporan	-
5.03.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	1 Laporan	50.000.000,00	APBD			
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	2 Laporan	30.000.000,00	APBD	Penyesuaian kebutuhan riil	2 Laporan	45.000.000,0
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		3 Dokumen	240.000.000,00			2 Dokumen	100.000.000,0
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kukar	1 Paket	140.000.000,00	APBD	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan		-
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kukar	30 Orang	50.000.000,00	APBD	Penyesuaian terhadap Standar Biaya Umum yang berlaku	30 Orang	50.000.000,0
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kukar	50 Orang	50.000.000,00	APBD	Penyesuaian terhadap Standar Biaya Umum yang berlaku	50 Orang	50.000.000,0

5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		8 Layanan	1.436.000.000,00			8 Layanan	1.136.000.000,0
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar	1 Paket	150.000.000,00	APBD	Pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan Gedung DIKLAT BKPSDM	37 Jenis	150.000.000,0
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar	3 Paket	150.000.000,00	APBD		4500 Porsi	150.000.000,0
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kukar	3 Paket	200.000.000,00	APBD	kebutuhan operasional kantor dan Gedung DIKLAT BKPSDM	317439 Unit	200.000.000,0
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kukar	127 Dokumen	21.000.000,00	APBD	Sub kegiatan tidak dibutuhkan	1277 Buku	21.000.000,0
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kukar	2 Paket	75.000.000,00	APBD	Penyesuaian kebutuhan riil	2 Jenis	75.000.000,0
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kukar	1 Laporan	125.000.000,00	APBD		5 Orang	125.000.000,0
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	1 Laporan	315.000.000,00	APBD	Pemenuhan kebutuhan terkait peningkatan frekuensi rapat koordinasi dengan instansi pusat/kementerian	100 Rapat	315.000.000,0
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	450 Dokumen	100.000.000,00	APBD		450 Berkas	100.000.000,0
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kukar	1 Dokumen	300.000.000,00	APBD	Pengelolaan website BKPSDM dan pelaksanaan fungsi PPID Pembantu		-
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		10 Persen	100.000.000,00			100 Persen	387.750.000,0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kukar	Unit		APBD	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana belajar untuk gedung diklat BKPSDM		
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kukar	1 nit	100.000.000,00	APBD	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung untuk gedung diklat BKPSDM	1 Paket	100.000.000,0
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	1.119.415.240,00			12 Bulan	1.119.415.240,0
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar	1 Laporan	22.000.000,00	APBD		12 Bulan	22.000.000,0

5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kukar	12 Laporan	170.000.000,00	APBD	Pemenuhan kebutuhan pembayaran rekening listrik, air dan speedy (indihome) untuk gedung diklat BKPSDM	12 Bulan	170.000.000,0
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar	1 laporan	100.000.000,00	APBD	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor diklat BKPSDM	12 Bulan	100.000.000,0
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kukar	12 Laporan	827.415.240,00	APBD	Pemenuhan kebutuhan Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan Gedung Diklat BKPSDM	12 Bulan	827.415.240,0
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		12 Unit	390.000.000,00			12 Unit	325.000.000,0
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kukar	12 Unit	325.000.000,00	APBD		12 Unit	325.000.000,0
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kukar	1 Unit	65.000.000,00	APBD			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Paket		APBD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Gedung DIKLAT BKPSDM di Tenggara Seberang	Paket	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara		95 Persen	8.290.000.000,00			96 Persen	3.215.000.000,0
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan		1365 ASN	2.050.000.000,00			1306 ASN	1.325.000.000,0
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kukar	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD	Penyusunan Kebutuhan ASN untuk 59 Perangkat Daerah	1 Dokumen	75.000.000,0
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kukar	1 Dokumen	450.000.000,00	APBD		661 ASN	450.000.000,0
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Kukar	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD		645 SK	100.000.000,0
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kab. Kukar	1 Lembaga	500.000.000,00	APBD		1142 ASN	500.000.000,0

5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	1 Dokumen	650.000.000,00	APBD	Digitalisasi seluruh layanan kepegawaian BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara		-
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kukar	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD		2999 Data	100.000.000,0
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kukar	1 Laporan	150.000.000,00	APBD	Pelaksanaan evaluasi data 59 Perangkat Daerah	70 Buku	100.000.000,0
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan		2495 ASN	625.000.000,00			2473 ASN	525.000.000,0
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Kukar	1 Dokumen	225.000.000,00	APBD	Menindaklanjuti perubahan nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai Permenpan RB No.45 Tahun 2022	316 SK	125.000.000,0
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kukar	1 Dokumen	200.000.000,00	APBD		2007 SK	200.000.000,0
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Kukar	1 Dokumen	200.000.000,00	APBD		150 ASN	200.000.000,0
5.03.02.2.03	Pengembangan kompetensi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi		360 PNS	4.250.000.000,00			360 PNS	825.000.000,0
5.03.02.2.03.01	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Kukar	600 Orang	1.250.000.000,00	APBD	Mandatory spending pengembangan kompetensi SDM aparatur	180 ASN	100.000.000,0
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kab. Kukar	3 Dokumen	1.500.000.000,00	APBD	Seleksi JPTP, Assesment Pejabat Ess III, IV dan Pejabat Fungsional serta optimalisasi Manajemen Talenta	80 ASN	350.000.000,0
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Kukar	100 Orang	1.500.000.000,00	APBD	Beasiswa PNS Tugas Belajar, Beasiswa Kukar Idaman, Beasiswa Tematik ASN Memenuhi Kebutuhan Kesenjangan kualifikasi Pendidikan dan Jabatan ASN Berdasarkan Analisa Jabatan dan Beban Kerja	100 ASN	375.000.000,0
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya		11491 ASN	1.365.000.000,00			10854 ASN	540.000.000,0
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD		1 Dokumen	100.000.000,0
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	1 Dokumen	850.000.000,00	APBD	Sosialisasi Manajemen ASN	10854 ASN	125.000.000,0

5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kukar	1 Laporan	75.000.000,00	APBD		1 Dokumen	75.000.000,0
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kab. Kukar	348 Orang	90.000.000,00	APBD		348 ASN	90.000.000,0
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Kukar	1 Laporan	200.000.000,00	APBD	Sosialisasi peraturan penegakan disiplin ASN	20 Kasus	100.000.000,0
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kab. Kukar	30 Dokumen	50.000.000,00	APBD		30 Surat	50.000.000,0
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional		24.64 Persen	8.820.000.000,00			26.64 Persen	2.130.000.000,0
5.04.02.2.01	Pengembangan kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis		200 ASN	3.000.000.000,00			200 ASN	400.000.000,0
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Kukar	550 Orang	3.000.000.000,00	APBD	Mandatory spending pengembangan SDM berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah	200 Peserta	400.000.000,0
5.04.02.2.02	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		106 ASN	5.820.000.000,00			112 ASN	1.730.000.000,0
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	90 Orang	1.000.000.000,00	APBD	1. Mandatory spending pengembangan kompetensi SDM aparatur	12 ASN	230.000.000,0
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Kukar	5 Laporan	4.820.000.000,00	APBD	Mandatory spending pengembangan SDM berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah	100 Peserta	1.500.000.000,0
	JUMLAH				32.743.331.188,00				19.137.806.535,0

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja adalah menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

a. Catatan Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024, menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pencapaian Visi dan Misi Daerah dapat terwujud dengan menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah, maka unsur-unsur organisasi mulai dari Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh pelaksana BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :

1. Melaksanakan Rencana Kerja BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
2. Menjaga konsistensi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja BKPSDM Kab. Kukar Tahun 2024 adalah akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025 dengan memperhatikan saran, informasi dan data-data dari masing-masing bidang untuk melakukan penyempurnaan sehingga mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Perangkat Daerah maupun di lingkup daerah.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi acuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dengan harapan agar dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat menjadi panduan yang efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tenggarong, Agustus 2024

